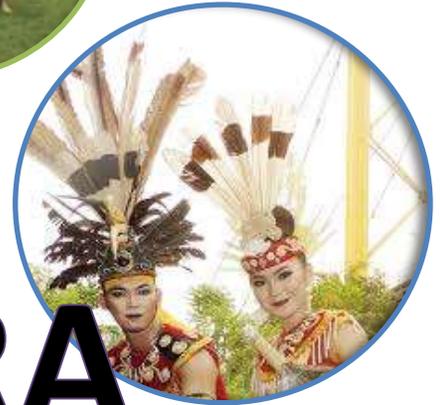


Rencana Strategis Tahun 2023- 2026

**REVISI
I**



RENSTRA

2023-2026



**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
BUDAYA DAN PARIWISATA**
Jl.Jend.Sudirman Komplek Perkantoran
Marabahan Kab.Barito Kuala

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT , atas perkenan-Nya sehingga Revisi I Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023 – 2026 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, dapat disempurnakan.

Penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 dengan me-reviu, berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 nomor 700/90.f/LHE-SAKIP/IRBAN III/INSPT tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Disporbudpar Tahun 2023.

Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Barito Kuala terdapat beberapa kekurangan sehingga dapat mempengaruhi kualitas Renstra. Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperbaiki seperti Tujuan Renstra yang berorientasi hasil, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja di Renstra yang selaras dengan RPD dan mempunyai hubungan kausalitas serta membuat Program dan Kegiatan yang ditetapkan secara langsung dan menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran Renstra.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut selanjutnya dilakukan Reviu terhadap Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 .

Dengan demikian diharapkan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 dapat meningkatkan nilai SAKIP terutama untuk penilaian dibidang perencanaan.

Demikian hasil reviu Renstra tahun 2023-2026 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Marabahan, 23 Juni 2024
Kepala,

SABIRIN, S.Sos, MM
NIP. 19681211 200501 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPORBUDPAR	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya	11
2.3. Kinerja Pelayanan.....	13
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPORBUDPAR	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala	17
3.2. Telaahan Visi dan Misi	21
3.3. Telaahan Renstra K/L.....	22
3.4. Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporbudpar.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....	48
5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis.....	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
BAB VIII PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.

Pembangunan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses Pembangunan Nasional dalam rangka mencapai cita – cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil, sejahtera lahir dan batin.

Pembangunan generasi muda merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan pemuda memiliki kedudukan yang jelas, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang tersebut berusaha mengatur secara lengkap menyeluruh tentang segala hal yang terkait dengan permasalahan kepemudaan nasional yang berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan bangsa.

Sistem kepemudaan nasional merupakan keseluruhan subsistem kepemudaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan kepemudaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain pelaku pemuda, organisasi pemuda, dana pemuda, prasarana dan sarana

pemuda peran serta masyarakat, dan penunjang kepemudaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri pemuda.

Seiring dengan adanya sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, maka undang-undang mengenai sistem kepemudaan juga memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kepemudaan diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan kepemudaan.

Pembangunan generasi muda tercakup didalam kerangka Pembangunan Sosial Budaya yang erat dengan pembangunan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 antara lain memuat Pembangunan Sosial Budaya diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia (Iman dan Taqwa), bermoral, berbudaya, beretika, beradab, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi era kompetitif global. Dengan demikian diharapkan terbentuk suatu generasi muda yang berpandangan luas kedepan, penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis dan seimbang dalam menyikapi kehidupan baik sebagai individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan keolahragaan adalah pembangunan fisik dan psychis untuk menjadi masyarakat yang sehat, sportif dan memiliki daya juang yang tinggi sebagai anak bangsa. Pembangunan olahraga merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam menempatkan harga diri daerah ditengah – tengah pergaulan nusantara dan mancanegara, karena melalui prestasi olahraga kita akan dihargai dan dihormati.

Demikian pula pembangunan kebudayaan yang sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya memperkuat ketahanan budaya bangsa, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa terhadap ancaman konflik vertikal dan horizontal, menanamkan cinta tanah air serta membangun watak, kepribadian yang disebut jati diri bangsa.

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan pemasukan devisa, serta menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air.

Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang menempati geografis strategis dan menyimpan potensi cukup besar untuk mendukung upaya pembangunan di daerah. Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala menjadi daerah yang terunggul dan berdaya saing tinggi dalam Pembangunan di Kalimantan Selatan. Untuk itu perlu suatu komitmen dan perencanaan secara matang, terkoordinasi dan sinkron dalam Sistem Perencanaan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional.

Disusunnya rencana strategis dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamkan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
12. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 bahwa RPD dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang mendasar.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;
19. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026;

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan selama empat tahun (masa transisi) dan rencana kerja tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala:

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan;
5. Memudahkan/meningkatkan komunikasi para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan berkualitas;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPORBUDPAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Disporbudpar
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Disporbudpar
 - 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.2.2. Aset yang Dikelola
 - 2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional
- 2.3. Kinerja Pelayanan Disporbudpar

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPORBUDPAR

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporbudpar
 - 3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis
 - 3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disporbudpar
 - 3.5.1. Tantangan
 - 3.5.2. Peluang
- 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN APRIWISATA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disporbudpar

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

2.1.1. Tugas

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.1.2. Fungsi

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pemuda dan Olahraga
- c. Bidang Kebudayaan
- d. Bidang Pariwisata
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Jabatan Fungsional

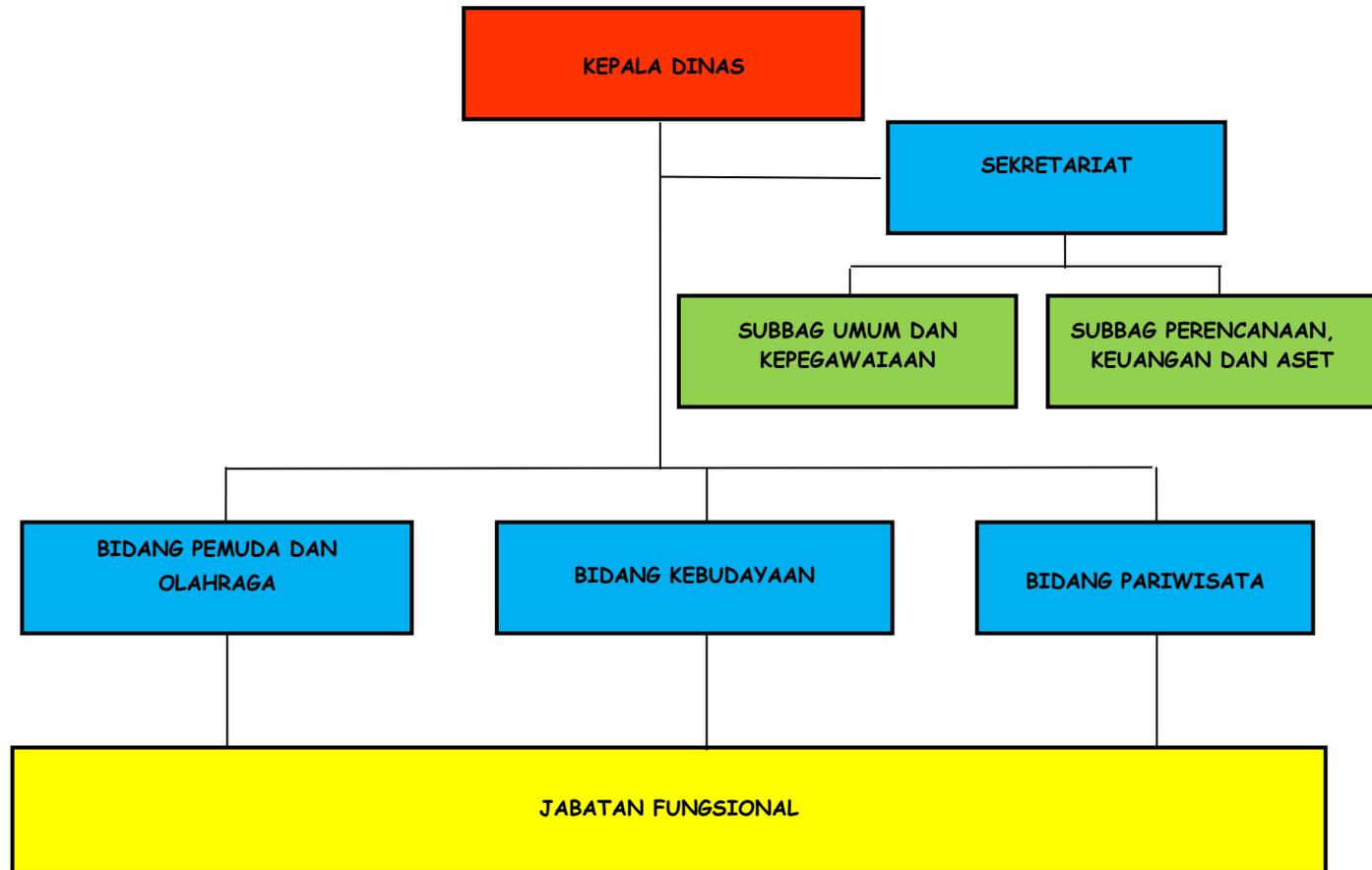
2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga
- d. Bidang Kebudayaan
- e. Bidang Pariwisata
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Jabatan Fungsional

Perbup No.105 / 2021,
Tanggal 21 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA



2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala didukung Sumber Daya berupa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset yang dikelola, serta Unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dikelola pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala seperti berikut ini :

PNS :

a. Berdasarkan Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S 2) = 4 orang
- Sarjana (S1) = 9 orang
- Sarjana Muda = 2 orang
- SLTA = 5 orang
- SLTP = 0 orang
- SD = 0 orang

Jumlah = 20 orang

b. Berdasarkan Kepangkatan :

- Pembina Utama Muda (IV/c) = 0 orang
- Pembina Tingkat I (IV/b) = 4 orang
- Pembina (IV/a) = 1 orang
- Penata Tingkat I (III/d) = 7 orang
- Penata (III/c) = 1 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) = 2 orang
- Penata Muda (III/a) = 0 orang
- Pengatur Tingkat I (II/d) = 3 orang
- Pengatur (II/c) = 2 orang

➤ Pengatur Muda TK. I (II/b)	= 0 orang
➤ Pengatur Muda (II/a)	= 0 orang
➤ Juru (I/c)	= 0 orang
<hr/>	
Jumlah	= 20 orang

NON PNS :

Berdasarkan Pendidikan :

➤ Sarjana (S1)	= 4 orang
➤ Sarjana Muda	= 2 orang
➤ SLTA	= 13 orang
➤ SLTP	= 2 orang
➤ SD	= 0 orang
<hr/>	
Jumlah	= 21 orang

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala berupa Aset tidak bergerak dan aset yang bergerak.

- a. Aset tidak bergerak terdiri dari Tanah dan Bangunan Kantor, Lapangan Sepakbola dan Tribun Lima Desember, Lapangan Tenis 4 Januari, Lapangan Basket, Lapangan Tembak, Lapangan Bola Voli, Gedung Bulu Tangkis Ije Jela, Gedung Olahraga SETARA, Lapangan Basket, Lapangan Tenis, Gedung Menembak dan Panggung Hiburan Gelora Barito.
- b. Aset yang bergerak terdiri dari Kendaraan Dinas (Mobil dan Sepeda Motor), dan Barang Inventaris Kantor lainnya (Meja, Kursi, Sofa, Lemari, Rak Besi, Tenda, Komputer, Laptop, AC, Lemari Es, Kipas Angin, Pesawat TV, Perangkat Telpon / Internet, LCD proyektor dll)

2.2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang masih operasional yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala berupa bangunan Gedung atau Lapangan Olahraga (Gedung Bulu Tangkis Ije Jela, Gedung Latihan Menembak, Lapangan Basket, Lapangan Tenis, Lapangan Sepakbola, Lapangan Bola Voli dan Tribun Penonton), GOR Setara serta Panggung Hiburan Gelora Barito).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal terhadap masyarakat di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan bidang kepariwisataan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, telah dilaksanakan Program dan Kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan optimal selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dengan capaian pelayanan seperti tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Fungsi Disporbudpar	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	-	-	-	4	8	8	8	10	6	8	13	7	0	150	100	162,5	87,5	0
2	Persentase cabang olahraga yang berprestasi (persen)	-	-	-	15,6 (5/32* 100)	25 (8/32* 100)	15,6 (5/32* 100)	25 (8/32* 100)	28 (9/32* 100)	25 (8/32* 100)	25 (8/32* 100)	15,6 (5/32* 100)	25 (8/32* 100)	0	160	112,5	12,5	100	0
3	Persentase jenis Seni budaya yang menjadi Obyek Wisata (persen)	-	-	-	18,18 (2/11* 100)	18,18 (2/11* 100)	18,18 (2/11* 100)	36,36 (4/11* 100)	45,45 (5/11* 100)	18,18 (2/11* 100)	18,18 (2/11* 100)	18,18 (2/11* 100)	36,36 (4/11* 100)	0	100	100	100	100	0
4	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	-	-	-	127.868	160.774	116.501	127.938	160.489	131.883	165.441	69,60	93.329	0	103,14	102,9	59,6	72,95	0

Berdasarkan data tabel 2.1 di atas secara umum capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala telah tercapai dengan baik, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja dengan indikator "Jumlah Pemuda yang Berprestasi" rata-rata rasio capaian sebesar 125 % atau melebihi target. Peningkatan terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020, kemudian tahun 2019 sesuai target dan tahun 2021 terjadi penurunan. Penurunan capaian target kinerja disebabkan karena tahun 2021 terjadi perubahan/pembatalan kegiatan akibat Pandemi Covid 19.

- b. Pencapaian kinerja dengan indikator "Persentase cabang olahraga yang berprestasi" rata-rata rasio capaian sebesar 96,25 % atau kurang dari target. Penurunan capaian target kinerja disebabkan selain Pandemi Covid 19 juga persaingan semakin ketat antar peserta, sehingga atlet yang dikirim mengikuti pertandingan kurang maksimal dalam peraihan medali.
- c. Pencapaian kinerja dengan indikator "Persentase jenis Seni budaya yang menjadi Obyek Wisata" rata-rata rasio capaian sebesar 100 % atau sesuai target.
- d. Pencapaian kinerja dengan indikator "Jumlah kunjungan wisatawan" rata-rata rasio capaian sebesar 84,65 % atau kurang dari target. Penurunan capaian target kinerja terutama untuk tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan Pandemi Covid 19 yang menerapkan Protokol Kesehatan yang sangat ketat, sehingga Destinasi Wisata ditutup, akibatnya banyak wisatawan batal berkunjung.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebelumnya (2018-2021) pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dianggarkan melalui DPA Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.40.626.497.164,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 38,073,049,187,- atau dengan serapan sebesar 93.71 %, dengan demikian dapat diketahui efisiensi pada akhir Renstra sebesar Rp.2.553.447.977,-. atau 6.29 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2018-2022
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Jumlah Pemuda yang berprestasi	490,689,875.00	649,293,875.00	264,990,200.00	1,709,742,137.00	1,500,194,400	426,068,621.00	647,549,875.00	264,804,950.00	1,520,447,322.00	0	86.83	99.73	99.93	88.93	0	922,982,097	93.86 %
Persentase cabang olahraga yang berprestasi	3,161,383,450.00	3,508,740,000.00	16,376,018,500.00	4,764,692,900.00	5,110,415,505	3,076,491,000.00	2,527,160,500.00	16,359,769,533.00	4,672,769,000.00	0	97.31	72.02	99.90	98.07	0	6,584,250,071	91.83 %
Persentase jenis Seni budaya yang menjadi Obyek Wisata	1,166,851,915.00	1,831,291,000.00	1,301,311,247.00	1,521,409,750.00	999,230,185	1,153,601,315.00	1,431,637,550.00	1,279,236,000.00	1,449,496,280.00	0	98.86	78.18	98.30	95.27	0	1,364,018,819	92.65 %
Jumlah kunjungan wisatawan	776,062,620.00	1,913,461,000.00	681,182,880.00	509,375,815.00	515,292,930	739,049,800.00	1,431,420,825.00	590,107,061.00	503,439,555.00	0	95.23	74.81	86.63	98.83	0	879,075,049	88.88 %

Dari Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala melalui 2 indikator “ Jumlah Pemuda yang berprestasi dan Persentase cabang olahraga yang berprestasi” dan 2 indikator “Persentase jenis Seni budaya yang menjadi Obyek Wisata dan Jumlah kunjungan wisatawan”, selama periode Renstra Tahun 2018 - 2022 telah tercapai secara maksimal. Keberhasilan Disporbudpar tersebut membuktikan dukungan terhadap pencapaian Tujuan untuk Meningkatkan angka harapan hidup serta Meningkatnya PDRB Perkapita di Kabupaten Barito Kuala.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN APRIWISATA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

Sesuai uraian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai

berikut :

- Kurang optimalnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga.
- Kurang optimalnya promosi seni budaya dan destinasi pariwisata.
- Kurang optimalnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

3.1.1. Permasalahan

a. Bidang Pemuda dan Olahraga

- 1) Kualitas sumber daya pemuda masih banyak memerlukan latihan keterampilan, kewirausahaan, kecakapan hidup yang dapat memberikan bekal dalam merebut berbagai peluang kesempatan kerja, mengingat masih besarnya generasi muda yang putus sekolah dan sarjana pencari kerja.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung pembinaan pemuda masih terbatas.
- 3) Masih rendahnya prestasi olahraga dan terbatasnya pencetakan kader olahragawan yang berkualitas.
- 4) Masih rendahnya apresiasi masyarakat, pengusaha dan swasta terhadap olahraga.
- 5) Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana dalam pembinaan cabang-cabang olahraga di kecamatan dan desa-desa.

b. Bidang Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan serta semakin berkurangnya tokoh–tokoh kesenian daerah. Disisi lain ancaman masuknya nilai–nilai dan kesenian pop/kontemporer semakin gencar merasuki kalangan generasi muda.
- 2) Upaya pengendalian dan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya memerlukan dukungan tenaga profesional dan partisipasi masyarakat yang pada saat ini masih dirasakan belum memadai. Seperti perlindungan terhadap arsip yang bernilai sejarah belum sepenuhnya bisa diamankan oleh Pemerintah Daerah, karena berada ditangan pihak pemilik/ahli waris yang suatu saat bisa saja berpindah tangan kepada pihak luar.
- 3) Belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan untuk melestarikan seni budaya daerah, sehingga anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan dan pelestarian seni daerah belum mencapai hasil maksimal.

c. Bidang Pariwisata

1. Masih terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi obyek dan daya tarik objek wisata sehingga belum mampu menghadapi persaingan yang ketat dipasar pariwisata.
2. Pembangunan objek wisata masih bertumpu kepada keinginan produk bukan kepada orientasi keinginan pasar.
3. Lemahnya SDM, aparatur dan tenaga pengelola industri pariwisata sehingga kualitas pelayanan masih rendah.

3.1.2. Pengaruh Lingkungan Strategis

a. Pengaruh Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strenght)
 - 1.1. Otonomi Daerah
 - 1.2. Konsistensi Lembaga

- 1.3. Dukungan Dana
- 1.4. Infrastruktur
- 1.5. Sumber Daya Manusia tersedia
- 1.6. Kondisi Alam
- 2. Kelemahan (Weaknesses)
 - 2.1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2.2. Komitmen rendah
 - 2.3. Peran sadar wisata masyarakat dan swasta
 - 2.4. Keterbatasan anggaran
- b. Pengaruh Lingkungan Eksternal
 - 1. Peluang (Oppurtunities)
 - 1.1. Pasar bebas membuka
 - 1.2. Terbukanya Trans Kalimantan
 - 1.3. Semakin membaiknya Keamanan dan Stabilitas
 - 1.4. Kerjasama Regional
 - 2. Ancaman (Threats)
 - 2.1. Meningkat dan tajamnya persaingan bebas antar Daerah dan Negara
 - 2.2. Masuknya nilai-nilai Budaya luar
 - 2.3. Pasar bebas
 - 2.4. Gangguan Stabilitas Keamanan, Politik dll

Dari formulasi tersebut, maka dapat dijabarkan strategi kegiatan sebagai berikut :

- 1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S - O)
 - a. Meningkatkan komitmen pimpinan pemerintah daerah beserta masyarakat dan dunia usaha untuk membangun Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisataaan.

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan antar Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dengan Instansi dan seluruh Stakeholder.
 - c. Meningkatkan dukungan keamanan.
2. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W - O)
 - a. Meningkatkan kualitas SDM Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisata agar profesional, jujur, disiplin dan bebas KKN.
 - b. Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan para usahawan pariwisata seni dan budaya.
 - c. Menggali investasi dan peran swasta.
 3. Strategi menggunakan peluang untuk mengatasi ancaman S -T)
 - a. Meningkatkan kemampuan daya saing produk Kebudayaan dan Kepariwisata.
 - b. Meningkatkan disiplin kerja aparatur dan penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan upaya penyebaran informasi SDM Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisata.
 4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman (W - T)
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan diklat aparatur dan pengusaha pariwisata seni dan budaya.
 - b. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka pembinaan masyarakat dalam dunia pariwisata seni dan budaya.
 - c. Menyempurnakan sistem pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepariwisata.

Dari hasil analisis SWOT tersebut di atas melalui penilaian terhadap bobot dari masing - masing strategi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka dapat dirumuskan strategi yang ditempuh antara lain :

1. Mendorong, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam peran sertanya menggalakkan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan daerah.

2. Meningkatkan upaya pemasaran melalui berbagai promosi dan kerjasama dengan sektor terkait.
3. Mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan teknologi/media elektronik maupun website.
4. Meningkatkan SDM pelaku pariwisata melalui sertifikasi pengawasan, evaluasi dan pembinaan teknis kepariwisataan.
5. Meningkatkan kemitrakerjaan dengan stakeholder dan masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

3.2.Telaahan Visi dan Misi

Sesuai Inmendagri No. 70 Tahun 2021 dimana Kabupaten Barito Kuala tidak Menyusun RPJMD sehubungan dengan berakhirnya jabatan Bupati pada November 2022 dan Pilkada dilaksanakan Tahun 2024. Didalam peraturan tersebut diatur untuk daerah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. RPD memuat visi misi yang disesuaikan dengan RPJPD Kab. Barito Kuala. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025, maka telah ditetapkan visi “Terwujudnya Barito Kuala Yang Adil, Maju dan Mandiri Berbasis Agribisnis” yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Disporbudpar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka Disporbudpar berkontribusi untuk mewujudkan Misi 4 dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

3.3.1. Renstra Kementerian Pemuda dan Olah Raga 2020-2024

Tujuan dan Sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020-2024 adalah :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda
2.	Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
			Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk
			Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan

3.	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga
			Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games
			Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games
			Peringkat pada SEA Games
			Peringkat pada ASEAN Paragames

3.3.2. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan adalah :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama-- Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua —

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.3.3. Renstra Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 2020-2024

Tujuan strategis Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 adalah :

No	Tujuan	Indikator
1.	Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	Nilai devisa pariwisata
		Kontribusi PDB Pariwisata
		Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Sasaran Strategis Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2025 adalah :

- a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi
- b. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional
- c. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
- d. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
- e. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
- f. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
- g. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
- h. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian
- j. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif

- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- l. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang professional

Untuk mewujudkan harmonisasi dan sinergi antara Renstra K/L, Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan komparasi antara Renstra yang terkait sebagaimana dirangkum pada Tabel berikut :

Tabel 3.6

Komparasi Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra SKPD	Indikator Renstra SKPD	No	Sasaran Renstra K/L	Indikator Renstra K/L
Kementerian Pemuda dan Olah Raga					
1.	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase peningkatan prestasi pemuda	1.	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda
				Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

2.	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Persentase peningkatan prestasi atlet	2.	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga
					Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games
					Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan					
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	3.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan Kebudayaan	
Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif					
4.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	4.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	
				Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	

Keberhasilan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Kabupaten Barito Kuala dalam mencapai target sasaran tentu akan berdampak pada pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kementerian maupun Renstra Provinsi selaku Pembina daerah otonomi.

3.4 Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial.
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.
- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestik dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi publik masih rendah.
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur Sungai Barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negatif terhadap flora dan fauna yang di lindungi).
- g. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan listrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.
- h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan

Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relatif tinggi, dan potensi Kepariwisata belum berkembang secara optimal.

- i. Persebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disporbudpar

Dari hasil analisa capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan untuk 4 (empat) tahun kedepan.

3.5.1. Tantangan & Kelemahan

- a. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata berbasis agropolitan.
- b. Respon generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional yang masih cenderung pasif
- c. Infrastruktur yang mendukung akses menuju kawasan pariwisata belum tersedia secara merata.
- d. Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal.
- e. Alokasi kebijakan pembangunan kepemudaan masih kecil.
- f. Pengurus cabang olahraga kurang dalam memahami program kerja
- g. Kurang terselenggaranya pelatihan, kompetisi dan kejuaraan daerah
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pengembangan atlet dan cabang olahraga

3.5.2. Peluang

- a. Adanya kerjasama/kemitraan antara pemerintah dan swasta maupun dengan induk organisasi olahraga.

- b. Adanya potensi wilayah keparawisataan religius dengan daya magnet yang cukup kuat di sekitar Kabupaten Barito Kuala untuk menarik minat wisatawan luar Kabupaten Barito Kuala terhadap Kebudayaan dan Pariwisata yang bernuansa Islami.
- c. Adanya otonomi daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya sendiri
- d. Tersedianya sarana prasarana cabang unggulan yang mendukung untuk beraktifitas olahraga
- e. Regulasi pemerintah serta perlindungan terhadap atlet sangat tinggi
- f. Banyaknya atlet , pelatih dan perangkat olahraga yang menjadi motivasi para olahragawan
- g. Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa
- h. Jaringan *stakeholder* sudah mulai terbangun sehingga memudahkan efektivitas pelaksanaan tugas
- i. Munculnya beberapa pemuda pelopor yang tersebar di wilayah
- j. Koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik
- k. Potensi budaya lokal yang beraneka ragam yang diminati masyarakat

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

- a. Peningkatan daya saing sektor seni dan budaya, parawisata, pemuda dan olahraga
- b. Peningkatan pembinaan dan promosi budaya/wisata yang selektif,
- c. Peningkatan kualitas SDM bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga,
- d. Memberikan wadah bagi pemerhati terhadap budaya daerah,
- e. Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata daerah,
- f. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder yang terlibat,
- g. Meningkatkan pengembangan objek wisata daerah,

- h. Meningkatkan mutu produk wisata yang variatif dan berkualitas,
- i. Melaksanakan sosialisasi tentang permasalahan implementasi UU RI No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berhubungan dengan perbedaan kemampuan setiap daerah untuk menjamin kesejahteraan atlet yang berprestasi,
- j. Meningkatkan mutu objek wisata karena persaingan antar daerah tujuan wisata semakin ketat,
- k. Peningkatan penetrasi budaya asing dan jenis hiburan instan yang semakin berkembang,
- l. Memperkecil dampak kesenjangan ekonomi sosial dimasyarakat supaya merata;
- m. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang budaya, wisata pemuda dan olahraga supaya merata;
- n. Meningkatkan obyek wisata yang berkembang supaya memiliki fasilitas yang memadai;
- o. Peningkatan sosialisasi tentang obat-obatan terlarang dalam pemberantasan narkoba;
- p. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar olahraga yang tidak terkontaminasi dengan kegiatan politik demi terciptanya sportifitas dan peningkatan prestasi olah raga;
- q. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya olahraga demi kesehatan jasmani dan rohani serta memberikan pemahaman bahwa olah raga dapat menjadi pilihan profesi dan sumber pendapatan.

Rencana pengembangan kawasan Pariwisata dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala meliputi:

1. Obyek wisata alam Pulau Kembang, Pulau Kaget, Pulau Bakut, Pulau Curiak, wisata Agro Sungai Kambat, Kawasan Agropolitan Pengairan Terantang, wisata Lebak di Kecamatan Cerbon, Kawasan Pertanian Jejangkit, wisata air

disepanjang Sungai Barito (Susur Sungai), Kerbau Rawa dan Memancing Alam bebas di Kecamatan Kuripan. Wisata buatan Jembatan Barito, Jembatan Rumpiang Rumah Bulat, Gedung Juang, Taman Surya Lestari, Siring Ulek Marabahan, Palagan 5 Desember, Taman Bermain Raja Tumpang, Agrowisata Ekopark Jejangkit dan Talaran Setara dll).

2. Obyek wisata religius (Kubah Datuk H. Abdussamad, Datuk H. Jaferi, Datuk Sugli, Tuan Kayan, dan kegiatan upacara keagamaan komunitas Bali di Kecamatan Barambai dan Kecamatan Wanaraya).

Dari rencana Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jangka Panjang sebagaimana disebutkan diatas maka pembangunan program prioritas Kepala Daerah adalah :

1. Membentuk Pemuda yang memiliki kualitas dan kuantitas tinggi, inovatif, produktif dan profesionalisme.
2. Meningkatkan peranan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani serta terbentuknya atlet/olahragawan berprestasi tinggi berdasarkan iman dan taqwa.
3. Meningkatkan ketahanan budaya daerah serta menggali dan melestarikan nilai- nilai budaya sebagai identitas bangsa.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Promosi/ Pemasaran Pariwisata dengan didukung oleh SDM profesionalisme.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam sadar wisata serta mengembangkan kualitas dan kuantitas berdaya saing tinggi.
6. Pembinaan dan pengembangan Seni Budaya dan membangun gedung kesenian yang representatif dengan sarana dan prasarana pendukungnya.
7. Dalam rangka mendukung pendokumentasian seni budaya perlu dilakukan pemetaan budaya dan pemeliharaan situs budayanya.
8. Lembaga/organisasi/komunikasi/sanggar seni dan budaya yang sudah ada perlu lebih diberdayakan melalui kegiatan yang difasilitasi/didukung/ didanai oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

Kajian Dokumen Penunjang

1. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun jangka panjang Kabupaten Barito Kuala. Mengacu disini mempunyai makna bahwa rencana yang disusun berarti mengupayakan pengembangan diri secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan serta kebutuhan riil Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata selaras dengan pengembangan Kabupaten Barito Kuala.

Hubungan Kabupaten Barito Kuala dengan Pemerintah Provinsi/Pusat dan hubungan antar Kabupaten/Kota merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 secara simultan untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Kuala di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dengan arahan:
 1. Peningkatan kualitas pemuda dalam berbagai organisasi/kelompok.
 2. Peningkatan prestasi olahraga dalam berbagai even olahraga.
 3. Pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan destinasi pariwisata.
 4. Pengembangan wadah dan iklim untuk dialog antar strata sosial dan budaya.
 5. Pengembangan rasa cinta terhadap budaya daerah.
 6. Pengembangan budaya lokal yang berbasis pada kearifan lokal yang mendukung keberlangsungan lingkungan hidup.

Analisis Isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

1. Masih banyak bidang-bidang usaha jasa pariwisata yang memerlukan investasi bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
2. Meningkatnya arus informasi dan komunikasi yang didapat dari luar membawa serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya, etika, moral dan agama.
3. Semakin merambahnya peredaran narkoba menambah ancaman masa depan masyarakat terutama kalangan pemuda.
4. Informasi memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
5. Tidak semua benda-benda warisan alam dan budaya yang tersebar diluar dapat dihimpun oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Rencana Strategis Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Sasaran RPD Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 yaitu : “Meningkatnya kualitas Kesehatan dan Pendidikan” dengan Indikator sasaran RPD “Usia Harapan Hidup”. Meningkatkan pendapatan perkapita dengan Indikator PDRB per kapita serta Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP.

Dari Sasaran RPD Kabupaten Barito Kuala tersebut maka di tentukan Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala dalam empat tahun mendatang yaitu:

1.1 Tujuan :

Tujuan Rencana Strategis pelaksanaan pembangunan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala yaitu :

No.	TUJUAN	INDIKATOR	
		Sebelum Reviu	Sesudah Reviu
1	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pemuda terampil	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional
		Persentase prestasi olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/Nasional/ Internasional
2	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	PDRB pendapatan Perkapita	Persentase pendapatan sektor pariwisata
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kabupaten

1.2 Sasaran :

sasaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama kurun 4 (empat) tahun ke depan yaitu :

sebelum reuiu

No.	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional
2	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja DISPORBUDPAR	Nilai SAKIP Disporbudpar

sesudah reuiu

No.	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional
2	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/Nasional/Internasional
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan
4	Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata
5	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja DISPORBUDPAR	Nilai SAKIP Disporbudpar

Penjabaran dari uraian tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 a.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sebelum Reviu

NO.	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
						2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pemuda terampil	\sum pemuda yang berprestasi tahun berjalan / \sum pemuda di Barito Kuala x 100 %	0,044 % 33 / 75.445* 100%	0,046 % 35 / 75.445* 100%	0,049 % 37 / 75.445* 100%	0,052 % 39 / 75.445* 100%	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	Makna : Persentase peningkatan prestasi pemuda adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas SDM kepemudaan Cara perhitungan \sum pemuda yang berprestasi / \sum peserta yang mengikuti lomba x 100 %	71,43 % (50/70) *100%	72,86 % (51/70) *100%	74,29 % (52/70) *100%	75,71 % (53/70) *100%
				Persentase prestasi olahraga	\sum cabor yang berprestasi tahun berjalan / \sum cabor yang dibina x 100 %	37,78 % 17 / 45*100 %	40 % 18 / 45*100%	42,22 % 19 / 45*100%	44,44 % 20 / 45*100%	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi	Makna : Persentase peningkatan prestasi atlet adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas SDM keolahrgaan Cara perhitungan : \sum atlet yang berprestasi / \sum seluruh atlet yang mengikuti lomba x 100 %	26,79 % (30/112) *100%	13,39 % (15/112) *100%	35,71 % (40/112) *100%	23,21 % (26/112) *100%
2.	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	Meningkatkan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata	PDRB pendapatan Perkapita	\sum pendapatan perkapita sektor pariwisata tahun berjalan / \sum PAD Barito	5,59 rupiah (1.800.)	5,78 rupiah (1.860.0.)	5,97 rupiah (1.920.0.)	6,15 rupiah (1.980.0.)	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Makna : Jumlah kunjungan wisatawan adalah angka absolut yang menunjukkan	189.375 orang	189.910 orang	192.047 orang	194.720 orang

					Kuala x 100 %	000.000 (321.77 0.000)	000.000/ 321.770. 000)	000.000/ 321.770. 000)	000.000/ 321.770. 000)			banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata pada tahun berjalan: Cara perhitungan : \sum kunjungan wisatawan pada tahun berjalan				
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Rata-rata Nilai SAKIP SKPD	89,86	89,9	89,95	90	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disporbudpar	Makna : Nilai Evaluasi SAKIP SKPD adalah angka dalam point yang mengindikasikan besarnya nilai SAKIP SKPD yang dicapai pada tahun sebelumnya Cara perhitungan : Nilai SAKIP SKPD hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya	89,86	80	81	82

Tabel 4.1 b.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sesudah Reviu

NO.	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
						2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/ Nasional	\sum pemuda dan pramuka yang berprestasi dalam 1 tahun berjalan	50 orang	53 orang	55 orang	57 orang	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi /nasional	Makna : Jumlah pemuda yang menerima penghargaan adalah angka yang mengindikasikan besarnya prestasi pemuda dan pramuka dalam mengikuti lomba di tingkat provinsi /nasional Cara perhitungan \sum pemuda yang berprestasi pada tahun berjalan	50 orang	53 orang	55 orang	57 orang
				Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/	\sum atlet yang berprestasi dalam 1 tahun berjalan	35 orang	45 orang	47 orang	49 orang	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga	Makna : Perolehan medali adalah yang mengindikasikan	35 buah	45 buah	47 buah	49 buah

				internasional							tingkat provinsi/Nasional/ Internasional	besarnya atlet memperoleh medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/ Nasional/Internasional Cara perhitungan : \sum medali yang diperoleh atlet berprestasi pada tahun berjalan				
2.	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	Persentase pendapatan sektor pariwisata	\sum pendapatan sektor pariwisata tahun berjalan / \sum PAD Barito Kuala x 100 %	8,27 % (2.400.000.000 /29.000.000.000)	8,7 % (2.540.000.000/ 29.000.000.000)	8,79 % (2.550.000.000/ 29.000.000.000)	8,88 % (2.575.000.000/ 29.000.000.000)	Meningkatnya pembangunan wisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Makna : Jumlah kunjungan wisatawan adalah angka absolut yang menunjukkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kab.Barito Kuala Cara perhitungan : \sum kunjungan wisatawan pada tahun berjalan	189.375 orang	194.910 orang	195.047 orang	196.720 orang
										Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata	Makna : Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya kontribusi objek pemajuan kebudayaan dalam mendukung industri pariwisata Cara perhitungan : \sum objek pemajuan kebudayaan yang aktif / \sum objek pemajuan kebudayaan yang terdaftar x 100 %	40 %	50 %	60 %	70 %
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Disporbudpar tahun berjalan	68,94	70,94	72,94	74,94	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar	Makna : Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai	89,86	90	91	92

												SAKIP Disporbudpar yang dicapai pada tahun sebelumnya				
												Cara perhitungan : Nilai SAKIP Disporbudpar hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya				

Tabel 4.2.a.

Target Capaian Kinerja Program
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sebelum Reviu

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional	<p>➤ Makna : Persentase pemuda yang berprestasi adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas SDM kepemudaan</p> <p>➤ Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{pemuda yang berprestasi}}{\sum \text{peserta yang mengikuti lomba}} \times 100 \%$</p>	71,43 % (50/70) *100%	72,86 % 51/70) *100%	74,29 % 52/70) *100%	75,71 % (53/70) *100%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kapasitas organisasi kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang menerima penghargaan	<p>➤ Makna : Jumlah anggota pramuka yang menerima penghargaan adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan kapasitas anggota pramuka</p> <p>➤ Cara perhitungan : $\sum \text{anggota pramuka yang mengikuti kegiatan kepramukaan dan mendapatkan penghargaan dalam tahun berjalan}$</p>	14 Orang	15 Orang	16 Orang	17 Orang

2.	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	Meningkatnya kualitas SDM keolahrgaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional	<p>➤ Makna : Persentase atlet yang berprestasi adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas SDM keolahrgaan</p> <p>Cara perhitungan : Σ atlet yang berprestasi / Σ seluruh atlet yang mengikuti lomba x 100 %</p>	26,79 % (30/112) *100%	13,39 % (15/112) *100%	35,71 % (40/112) *100%	23,21 % (26/112) *100%
3.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kemajuan Budaya Lokal	Persentase objek pemajuan budaya lokal	<p>➤ Makna : Persentase peningkatan objek pemajuan budaya lokal adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan Kemajuan Budaya Lokal</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ objek pemajuan budaya lokal tahun berjalan / Σ objek pemajuan budaya lokal keseluruhanx100%</p>	40 % (4/10*100)	50 % (5/10*100)	60 % (6/10*100)	70 % (7/10*100)
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pengembangan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang dikembangkan	<p>➤ Makna : Jumlah Cagar Budaya Daerah yang dikembangkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pengembangan Cagar Budaya Daerah</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ cagar budaya yang dilestarikan / Σ cagar budaya yang dikelola dalam tahun berjalan</p>	14 buah	15 buah	15 buah	15 buah
			Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	<p>➤ Makna : Jumlah kunjungan wisatawan adalah angka absolut yang menunjukkan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ kunjungan wisatawan pada tahun berjalan</p>	189.375 orang	189.910 orang	192.047 orang	194.720 orang
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Obyek wisata yang dikunjungi wisatawan	<p>➤ Makna : Persentase Obyek wisata yang dikunjungi wisatawan adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya Daya tarik Destinasi Pariwisata</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ obyek wisata yang dikunjungi</p>	83,33 % (10/12*100%)	91,67 % (11/12*100%)	91,67 % (11/12*100%)	100 % (12/12*100%)

						wisatawan / Σ seluruh obyek wisata di Kab.Batola x 100 %				
4.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai SAKIP Disporbudpar	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disporbudpar	<p>➤ Makna : Nilai Evaluasi SAKIP SKPD adalah angka dalam angka yang mengindikasikan besarnya nilai SAKIP SKPD yang dicapai pada tahun sebelumnya</p> <p>➤ Cara perhitungan : Nilai SAKIP SKPD hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya</p>	89.86	80	81	82

Tabel 4.2.b.

Target Capaian Kinerja Program
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sesudah Reviu

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/ Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya pemuda yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	<p>➤ Makna : Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan prestasi pemuda di tingkat provinsi/nasional</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional selama 1 tahun berjalan</p>	54 Orang	60 Orang	62 orang	64 orang
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya anggota pramuka yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Jumlah anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	<p>➤ Makna : Jumlah anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan prestasi pramuka di tingkat provinsi/nasional</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat</p>	50 Orang	52 Orang	54 orang	56 Orang

						provinsi/nasional selama 1 tahun berjalan				
2.	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/ Nasional/ Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya atlet yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	<p>➤ Makna : Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan besarnya prestasi atlet di tingkat provinsi/nasional</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional dalam 1 tahun berjalan</p>	112 orang	150 orang	155 orang	160 orang
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Rata-rata lama tinggal wisatawan	<p>➤ Makna : Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah angka yang mengindikasikan peningkatan kualitas pembangunan wisata daerah</p> <p>➤ Cara perhitungan : Rata-rata lama hari tinggal wisatawan di kabupaten Barito Kuala dalam 1 tahun berjalan</p>	0,083 hari (2 jam/24 jam)	0,104 hari (2,5 jam/24 jam)	0,125 hari (3 jam/24 jam)	0,146 hari (3,5 jam/24 jam)
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Jumlah destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata	<p>➤ Makna : Jumlah destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata adalah angka yang mengindikasikan peningkatan obyek wisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata yang dibangun dalam 1 tahun berjalan</p>	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek
4.	Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya daya tarik objek kebudayaan	Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun	<p>➤ Makna : Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan daya tarik kebudayaan</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun dalam 1 tahun berjalan</p>	7.500 orang	8.500 orang	10.000 orang	12.500 orang

			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya daya tarik cagar budaya	Jumlah wisatawan yang mengunjungi cagar budaya	<p>➤ Makna : Jumlah wisatawan yang mengunjungi cagar budaya adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan daya tarik cagar budaya</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ wisatawan yang berkunjung dalam 1 tahun berjalan</p>	18.500 orang	19.000 orang	19.500 orang	20.000 orang
5.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai SAKIP Disporbudpar	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas SAKIP Disporbudpar	Persentase capaian nilai SAKIP Disporbudpar	<p>➤ Makna : Persentase capaian nilai SAKIP Disporbudpar adalah angka yang mengindikasikan nilai rata-rata SAKIP Disporbudpar dari beberapa komponen yang dicapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Σ nilai rata-rata beberapa komponen yang dinilai / Σ bobot komponen yang dinilai x 100 %</p>	89,86 %	90 %	91 %	92 %
				Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	<p>➤ Makna : Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja mengindikasikan besarnya nilai SAKIP dari komponen perencanaan kinerja yang dicapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja tahun berjalan</p>	27,84	27,85	27,88	27,91
				Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	<p>➤ Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja yang dicapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	26,35	26,39	26,42	26,48

				Meningkatnya kualitas pelaporan Kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja	<p>➤ Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja yang dicapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja tahun berjalan</p>	13,86	13,87	13,89	13,90
				Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	<p>➤ Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal yang dicapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal tahun berjalan</p>	21,81	21,89	22,81	23,71
				Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	<p>➤ Makna : Persentase perjanjian kinerja yang tercapai adalah angka yang mengindikasikan besarnya Persentase perjanjian kinerja yang tercapai</p> <p>➤ Cara perhitungan : Persentase perjanjian kinerja yang tercapai tahun berjalan</p>	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.3.a.
Target Capaian Kinerja Kegiatan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sebelum Reviu

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi /nasional	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemuda yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi	Makna : Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan kapasitas pemuda Cara perhitungan : Σ Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi selama 1 tahun berjalan	50 orang	51 orang	52 orang	53 orang
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat nya eksistensi organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Makna : Persentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan eksistensi organisasi kepemudaan Cara	100 %	100 %	100 %	100 %

						<p>perhitungan : Σ organisasi kepemudaan yang aktif / Σ organisasi kepemudaan yang dibina x100 %</p>				
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang menerima penghargaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Kapasitas SDM kepramukaan	Jumlah keikutsertaan lomba kepramukaan tingkat daerah dan nasional	<p>Makna : Jumlah keikutsertaan lomba kepramukaan tingkat daerah dan nasional adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan Kapasitas SDM kepramukaan</p> <p>Cara perhitungan : Σ anggota pramuka yang ikut lomba kepramukaan tingkat daerah dan nasional selama 1 tahun berjalan</p>	40 orang	54 Orang	56 Orang	58 Orang
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi /nasional/ internasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya atlet yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi	Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi	<p>Makna : Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan atlet ditingkat provinsi</p> <p>Cara perhitungan : Σ atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi</p>	30 orang	15 orang	40 orang	26 orang

			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas atlet	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah dan nasional	Makna : Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah dan nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan kuantitas dan kualitas atlet Cara perhitungan : Σ atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah dan nasional dalam 1 tahun berjalan	112 orang	112 orang	112 orang	112 orang
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah provinsil	Makna : Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah provinsil adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi Cara perhitungan : Σ atlet yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi selama 1 tahun berjalan	0 orang	8 orang	8 orang	8 orang

			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya eksistensi organisasi keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang aktif dibina	Makna : Persentase cabang olahraga yang aktif dibina adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan eksistensi organisasi keolahragaan Cara perhitungan : Σ cabang olahraga yang aktif dibina / Σ cabang olahraga yang terdaftar x 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan budaya lokal	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perkembangan kebudayaan lokal daerah	Jumlah kebudayaan daerah yang terkelola	Makna : Jumlah kebudayaan daerah yang terkelola adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan perkembangan kebudayaan lokal daerah Cara perhitungan : Σ kebudayaan daerah yang terkelola selama 1 tahun berjalan	5 objek	6 objek	7 objek	7 objek
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang dikembangkan	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang terkelola	Makna : Jumlah Cagar Budaya Daerah yang terkelola adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah Cara	14 buah	15 buah	15 buah	15 buah

						perhitungan : Σ Cagar Budaya Daerah yang dikelola selama 1 tahun berjalan				
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perkembangan Cagar Budaya Daerah	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Makna : Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan Perkembangan Cagar Budaya Daerah Cara perhitungan : Σ Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan selama 1 tahun berjalan	0 objek	1 objek	1 objek	1 objek
6.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Makna : Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah angka yang mengindikasikan peningkatan kualitas pembangunan wisata daerah Cara perhitungan : Rata-rata lama jam tinggal wisatawan / Σ jam sehari semalam	0,27 hari (6,48 jam/24 jam)	0,28 hari (6,72 jam/24 jam)	0,29 hari (6,96 jam/24 jam)	0,30 hari (7,2 jam/24 jam)

				Meningkatnya Industri Pariwisata	Persentase peningkatan usaha pariwisata	<p>Makna : Persentase peningkatan usaha pariwisata adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan Industri Pariwisata</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{usaha pariwisata tahun berjalan} - \text{usaha pariwisata tahun } N-1}{\sum \text{usaha pariwisata tahun } N \text{ awal Renstra}} \times 100 \%$</p>	<p>1,39 % $\{(365-360)/360 \times 100\}$</p>	<p>1,67 % $\{(366-360)/360 \times 100\}$</p>	<p>2,78 % $\{(370-360)/360 \times 100\}$</p>	<p>3,89 % $\{(374-360)/360 \times 100\}$</p>
7.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Obyek wisata yang dikunjungi wisatawan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Meningkatnya pendukung Destinasi Pariwisata	Cakupan Sapta Pesona Pariwisata yang terbangun	<p>Makna : Cakupan Sapta Pesona Pariwisata yang terbangun adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan pendukung Destinasi Pariwisata</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{obyek wisata Pariwisata yang terbangun sapta pesonanya}}{\sum \text{seluruh obyek wisata Pari wisata}} \times 100 \%$</p>	<p>25 % $(3/12 \times 100)$ (3 obyek Ecopark Jejangkit, Pulau Curiak, Siring Ulek Marabahan)</p>	<p>25 % $(3/12 \times 100)$ (3 obyek Ecopark Jejangkit, Talaran Setara, Siring Ulek Marabahan)</p>	<p>25 % $(3/12 \times 100)$ (3 obyek Ecopark Jejangkit, Makam Datuk Abdussamad, Siring Ulek Marabahan)</p>	<p>25 % $(3/12 \times 100)$ (3 obyek Agropolitan Tarantang (Kampung Inggris), RTH Jembatan Rumpiang, Susur Sungai)</p>

					Persentase peningkatan usaha pariwisata	<p>Makna : Persentase peningkatan usaha pariwisata adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan usaha pariwisata</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{usaha pariwisata yang dibina tahun berjalan} - \sum \text{usaha pariwisata yang dibina tahun N-1}}{\sum \text{usaha pariwisata yang dibina tahun N awal Renstra}} \times 100 \%$</p>	<p>1,39 $\{(365-360)/360*100\}$</p>	<p>1,67 $\{(366-360)/360*100\}$</p>	<p>2,78 $\{(370-360)/360*100\}$</p>	<p>3,89 $\{(374-360)/360*100\}$</p>
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Disporbudpar	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<p>Makna : Persentase jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{Laporan Capaian Kinerja}}{\sum \text{Laporan Capaian Kinerja selama setahun}} \times 100 \%$</p>	100 %	100 %	100 %	100 %

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	<p>Makna : Persentase Administrasi Keuangan adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan laporan administrasi keuangan</p> <p>Cara perhitungan : Σ Laporan Administrasi Keuangan / Σ Laporan Administrasi Keuangan selama setahun x 100 %</p>	100 %	100 %	100 %	100 %
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas SDM ASN	Persentase ASN yang terampil	<p>Makna : Persentase ASN yang terampil adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan kualitas SDM ASN</p> <p>Cara perhitungan : Σ ASN yang terampil / Σ ASN seluruhnya x 100 %</p>	15 %	15 %	20 %	20 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum	<p>Makna : Persentase Administrasi Umum adalah angka dalam persen yang mengindikasikan</p>	100 %	100 %	100 %	100 %

						kan besarnya laporan Administrasi Umum Cara perhitungan : Σ Laporan Administrasi Umum / Σ Laporan Administrasi Umum selama setahunx100 %				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Makna : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan pengadaan barang milik daerah Cara perhitungan : Σ Pengadaan Barang Milik Daerah / Σ Pengadaan Barang Milik Daerah selama setahunx100 %	0 %	0 %	100 %	0 %
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Makna : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan	100 %	100 %	100 %	100 %

						<p>ketersediaan jasa penunjang</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{Penyediaan Jasa Penunjang}}{\sum \text{Penyediaan Jasa Penunjang selama setahun}} \times 100 \%$</p>				
			<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</p>	<p>Makna : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan pemeliharaan barang milik daerah</p> <p>Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{Pemeliharaan Barang Milik Daerah}}{\sum \text{Pemeliharaan Barang Milik Daerah selama setahun}} \times 100 \%$</p>	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 4.3.b.

Target Capaian Kinerja Kegiatan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sesudah Reviu

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
							2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang Ditingkatkan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangannya	<p>Makna : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan jumlah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan yang dibina</p> <p>Cara perhitungan : Σ Pemuda Kader Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya yang dibina dalam 1 tahun berjalan</p>	54 orang	60 orang	62 orang	64 orang

			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten yang Ditingkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangannya	Makna : Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten yang Ditingkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangannya adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan jumlah organisasi kepemudaan yang dibangun Cara perhitungan : Σ organisasi kepemudaan kabupaten yang dibangun dalam 1 tahun berjalan	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
2.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/nasional	Makna : Jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/nasional Cara perhitungan : Σ organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/nasional dalam	4 Organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi

						1 tahun berjalan				
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional	<p>Makna : Jumlah cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional</p> <p>Cara perhitungan : Σ cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional dalam 1 tahun berjalan</p>	14 cabor	16 cabor	18 cabor	20 cabor
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten	<p>Makna : Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan jumlah atlet yang berpartisipasi pada kejuaraan tingkat kabupaten</p> <p>Cara perhitungan : Σ atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten dalam 1 tahun berjalan</p>	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang

			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah provinsi	Makna : Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah provinsi adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi Cara perhitungan : Σ atlet yang mengikuti pemusatan latihan di provinsi dalam 1 tahun berjalan	0 orang	8 orang	8 orang	8 orang
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif dibina	Makna : Jumlah cabang olahraga yang aktif dibina adalah jumlah dalam angka yang mengindikasikan jumlah cabang olahraga yang aktif dibina Cara perhitungan : Σ cabang olahraga yang aktif dibina dalam 1 tahun berjalan	35 cabang	36 cabang	37 cabang	38 cabang
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengembangan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik	Makna : Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan pengembangan Kebudayaan	4 objek	5 objek	6 objek	7 objek

						Cara perhitungan : Σ objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik dalam 1 tahun berjalan				
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah wisatawan yang mengunjungi cagar budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelestarian cagar budaya Kabupaten	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Makna : Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan pelestarian cagar budaya Cara perhitungan : Σ cagar budaya yang dilestarikan 1 tahun berjalan	14 buah	15 buah	16 buah	17 buah
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Makna : Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya peningkatan penetapan Cagar Budaya Daerah Cara perhitungan : Σ Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan dalam 1 tahun berjalan	0 buah	1 buah	1 buah	1 buah
6.	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Kabupaten	Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan	Makna : Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan adalah angka yang mengindikasikan pelaksanaan / partisipasi pemasaran	6 event	7 event	8 event	9 event

						pariwisata tingkat kabupaten / provinsi/nasional Cara perhitungan : Σ Jumlah event Pemasaran Pariwisata dalam 1 tahun berjalan				
7.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Atraksi di destinasi pariwisata (event)	Makna : Jumlah Atraksi di destinasi pariwisata mengindikasikan peningkatan daya tarik obyek wisata kabupaten Cara perhitungan : Σ Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan wahana bermain dalam 1 tahun berjalan	1 event	1 event	1 event	1 event
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase capaian nilai SAKIP Disporbudpar	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	Makna : Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai SAKIP dari komponen perencanaan kinerja yang dicapai Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja tahun berjalan	27,84	27,85	27,88	27,91

				Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja yang dicapai Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja tahun berjalan	26,35	26,39	26,42	26,48
				Meningkatnya kualitas pelaporan Kinerja	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja	Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja yang dicapai Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja tahun berjalan selama setahun	13,86	13,87	13,89	13,90

				Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Makna : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal adalah angka yang mengindikasikan besarnya nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal yang dicapai Cara perhitungan : Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal tahun berjalan	21,81	21,89	22,81	23,71
				Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	Makna : Persentase perjanjian kinerja yang tercapai adalah angka yang mengindikasikan besarnya Persentase perjanjian kinerja yang tercapai Cara perhitungan : $\frac{\sum \text{Laporan Administrasi Umum}}{\sum \text{Laporan Administrasi Umum selama setahun}} \times 100 \%$				

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Makna : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah adalah angka dalam persen yang mengindikasikan besarnya peningkatan pengadaan barang milik daerah Cara perhitungan : Persentase perjanjian kinerja yang tercapai tahun berjalan	100 %	100 %	100 %	100 %
--	--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	-------

Tabel 4.4

Target Capaian Kinerja Sub Kegiatan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	MAKNA / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang Ditingkatkan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangannya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Makna : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Cara perhitungan : Σ Pemuda Kader	54 orang	60 orang	62 orang	64 orang

					Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya dalam 1 tahun berjalan				
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	<p>Makna : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten</p> <p>Cara perhitungan : Σ Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten dalam 1 tahun berjalan</p>	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (dokumen)	<p>Makna : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan</p> <p>Cara perhitungan : Σ Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan dalam 1 tahun berjalan</p>	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

3.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/nasional	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (organisasi)	Makna : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Cara perhitungan : Σ Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam 1 tahun berjalan	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi	4 organisasi
4.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Makna : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga Cara perhitungan : Σ Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dikembangkan dalam 1 tahun berjalan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Makna : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

					Cara perhitungan : Σ Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar dalam 1 tahun berjalan				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	Makna : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Cara perhitungan : Σ Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Tersedia dan Termanfaatkan dalam 1 tahun berjalan	4 unit	5 unit	6 unit	7 unit
5.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	Makna : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Cara perhitungan : Σ Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten dalam 1 tahun berjalan	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	7 dokumen
6.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	Makna : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu	0 pelatda	1 pelatda	1 pelatda	1 pelatda

		provinsil	Science)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (pelatda)	Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Cara perhitungan : Σ Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) dalam 1 tahun berjalan				
7.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif dibina	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Makna : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten/ Kota adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten dengan Lembaga Terkait Cara perhitungan : Σ Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten dalam 1 tahun berjalan	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
8.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Makna : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Cara perhitungan : Σ Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	4 objek	5 objek	6 objek	7 objek

					Pemanfaatan dalam 1 tahun berjalan				
9.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Makna : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pelindungan Cagar Budaya Cara perhitungan : Σ Objek Cagar Budaya yang Dilindungi dalam 1 tahun berjalan	14 objek	15 objek	16 objek	17 objek
10.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Makna : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan adalah angka yang mengindikasikan besarnya penetapan Cagar Budaya Cara perhitungan : Σ Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan dalam 1 tahun berjalan	0 objek	1 objek	1 objek	1 objek
11.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Makna : Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Cara perhitungan : Σ Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dalam 1 tahun berjalan	6 laporan	7 laporan	8 laporan	9 laporan
12	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Atraksi di destinasi pariwisata	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	Makna : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara adalah angka yang mengindikasikan besarnya penyediaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit

					dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Cara perhitungan : Σ Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten yang tersedia dan terpelihara dalam 1 tahun berjalan				
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Makna : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten Cara perhitungan : Σ Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten dalam 1 tahun berjalan	4 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	7 dokumen
13.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makna : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah angka yang mengindikasikan besarnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia Cara perhitungan : Σ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan

					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun berjalan				
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<p>Makna : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah angka yang mengindikasikan besarnya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan</p> <p>Cara perhitungan : Σ ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 tahun berjalan</p>	20 orang	22 orang	25 orang	25 orang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p>Makna : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah angka yang mengindikasikan besarnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Cara perhitungan : Σ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam 1 tahun berjalan</p>	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
15.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terampil	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<p>Makna : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Cara perhitungan : Σ Pelaksanaan Bimbingan</p>	3 orang	3 orang	3 orang	4 orang

					Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 tahun berjalan				
16.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<p>Makna : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Cara perhitungan : Σ Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 tahun berjalan</p>	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<p>Makna : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Cara perhitungan : Σ Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 tahun berjalan</p>	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<p>Makna : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Cara perhitungan : Σ Peyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 tahun berjalan</p>	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Makna : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Cara perhitungan : Σ Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 tahun berjalan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Makna : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Cara perhitungan : Σ Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 tahun berjalan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (laporan)	Makna : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Cara perhitungan : Σ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 tahun berjalan	110 laporan	110 laporan	110 laporan	110 laporan
17.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Makna : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit

					penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Cara perhitungan : Σ Peyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 tahun berjalan				
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makna : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cara perhitungan : Σ Peyediaan Jasa Surat Menyurat dalam 1 tahun berjalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makna : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Cara perhitungan : Σ Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 tahun berjalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	Makna : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Cara perhitungan : Σ Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan

					dalam 1 tahun berjalan				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makna : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Cara perhitungan : Σ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 tahun berjalan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah (persen)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makna : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Cara perhitungan : Σ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 tahun berjalan	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makna : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit

					Cara perhitungan : Σ Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 1 tahun berjalan				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makna : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi adalah angka yang mengindikasikan besarnya pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Cara perhitungan : Σ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun berjalan	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dalam empat tahun mendatang (2023-2026) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan

pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 1.

Analisa Lingkungan Strategis Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala

<p style="text-align: center;">Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Disporbudpar dalam perencanaan pembangunan daerah; 2) Adanya dukungan yang kuat dari Bupati / Wakil Bupati terhadap Disporbudpar 3) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja; 4) Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Disporbudpar dalam perencanaan pembangunan; 5) Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah. 	<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya koordinasi antar SKPD; 2) Meningkatnya tuntutan masyarakat tentang perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel; 3) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran; 4) Belum terpadunya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
--	---	--

<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai; 2) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; 3) Tingginya motivasi sumberdaya manusia dalam meningkatkan kinerja; 4) Berkembangnya pengalaman dan pengetahuan dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan; 	<p>Keterkaitan S – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan SDM dan yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah; 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien. 	<p>Keterkaitan S – T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal; 2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; 3) Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 2) Belum terisinya struktur organisasi sesuai 	<p>Keterkaitan W – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan 	<p>Keterkaitan W – T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencanaan lebih partisipatif, transparan, dan

<p>dengan latar belakang pendidikan;</p> <p>3) Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan desa dan kecamatan;</p> <p>4) Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang sumberdaya desa dan kecamatan;</p> <p>5) Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik</p>	<p>komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan.</p> <p>2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan;</p> <p>3) Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan;</p> <p>4) Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan</p>	<p>akuntabel;</p> <p>2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah;</p> <p>3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.</p> <p>4) Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.</p>
--	---	---

	budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.	
--	---	--

1. Keterkaitan Potensi - Peluang (S-O)

- 1) Pengembangan SDM yang didukung apresiasi pemangku kepentingan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi informasi menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- 3) Ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis menjadikan pelaksanaan rencana pembangunan semakin efektif dan efisien.

2. Keterkaitan Potensi – Ancaman (S – T)

- 1) Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan merupakan tolok ukur upaya memberikan pelayanan masyarakat secara optimal;
- 2) Peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan sistem informasi memperkuat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
- 3) Peningkatan pengetahuan dan pengalaman dan peningkatan sinergi antar SKPD menjadikan proses perencanaan menjadi semakin efektif dan bermutu.

3. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – O)

- 1) Pelaksanaan manajemen berbasis kinerja, dukungan pimpinan daerah, komitmen para pemangku kepentingan dan kemampuan komunikasi publik yang andal meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan.

- 2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan khusus; serta pemahaman terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperkuat perencanaan berbasis desa dan kecamatan;
- 3) Pengembangan data dasar dan informasi wilayah desa dan kecamatan yang akurat, lengkap dan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mutu dan kinerja perencanaan;
- 4) Penataan dan peningkatan efektivitas Musrenbang sebagai forum koordinasi dan komunikasi para pemangku kepentingan dengan memperhatikan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat memperlancar percepatan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

4. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – T)

- 1) Penataan manajemen kinerja dan peningkatan koordinasi antar SKPD menjadikan perencanaan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- 2) Peningkatan kapasitas teknis perencanaan dan penganggaran; serta penataan manajemen kinerja akan mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya daerah;
- 3) Peningkatan kemampuan koordinasi dan komunikasi publik; serta penguatan koordinasi antar SKPD memperkuat mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.

Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sebelum perubahan

Sasaran RPD : <i>1. Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan</i> <i>2. Meningkatnya pendapatan per kapita</i>			
Indikator Sasaran RPD : <i>1. Usia Harapan Hidup</i> <i>2. PDRB per kapita</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, workshop, Lomba, bantuan pembinaan
	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, workshop, Lomba, bantuan pembinaan • Sarpras olah raga dan kepemudaan • Pembinaan atlet-atlet berprestasi
Meningkatkan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pembinaan lembaga seni dan pelestarian budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras kebudayaan • Pembinaan sanggar-sanggar seni untuk menciptakan kreasi
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba/festival, sarpras wisata, event-event wisata

Sesudah perubahan

Sasaran RPD : <i>1. Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan</i> <i>2. Meningkatnya pendapatan per kapita</i>			
Indikator Sasaran RPD : <i>1. Usia Harapan Hidup</i> <i>2. PDRB per kapita</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, workshop, Lomba, bantuan pembinaan

	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, workshop, Lomba, bantuan pembinaan • Sarpras olah raga dan kepemudaan • Pembinaan atlet-atlet berprestasi
Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Lomba/festival, sarpras wisata, event-event wisata
	Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Pembinaan lembaga seni dan pelestarian budaya lokal Pembinaan lembaga seni dan pelestarian budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Sarpras kebudayaan • Pembinaan sanggar-sanggar seni untuk menciptakan kreasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2023-2026 berpedoman kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 6. 1.

Program, Kegiatan, sub Kegiatan
(Pemutakhiran sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala

SEBELUM PEMUTAKHIRAN				SESUDAH PEMUTAKHIRAN						
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang Ditingkatkan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangannya	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
		Kegiatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten yang Ditingkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangannya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota
									Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas

									dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan
2	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasio nal	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/ Nasional	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya atlet yang memenuhi kriteria sebagai wakil kabupaten di tingkat provinsi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/ Nasional	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan						Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota						Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	yang Tersedia dan Termanfaatkan
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan (orang)
		Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif dibina	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi cagar budaya	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi
							Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan

6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Atraksi di destinasi pariwisata	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

Tabel 6. 2.a.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala

Sebelum Reviu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
		x.xx														
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Nilai SAKIP	68.94	70.94		72.94		74.94		76.94		76.94	Kepala Dinas	SKPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disporbudpar			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	89.81	89.86		80		81		82		82	Kepala Dinas	SKPD
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar	89.81 point	89.86 point	3,871,423,534	80 point	3,921,271,234	81 point	4,084,356,620	82 point	4,304,356,620	82 point	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (%)	100 %	100 %	111,640,000	100 %	120,475,600	100 %	111,640,000	100 %	111,640,000	400 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	12 laporan	12 laporan	111,640,000	12 laporan	120,475,600	12 laporan	111,640,000	12 laporan	111,640,000	48 laporan	Sekretaris	SKPD

				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)												
		x.xx.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan (persen)	100 %	100 %	2,804,669,264	100 %	2,804,669,264	100 %	3,006,602,350	100 %	3,006,602,350	400 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	20 orang/bulan	20 orang/Bulan	2,798,066,914	22 orang/Bulan	2,798,066,914	25 orang/Bulan	3,000,000,000	25 orang/Bulan	3,200,000,000	92 orang/bulan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 laporan	1 laporan	6,602,350	4 laporan	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terampil (persen)	0 %	15 %	33,891,750	15 %	38,591,750	20 %	44,891,750	20 %	44,891,750	70 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 orang	3 orang	33,891,750	3 orang	38,591,750	3 orang	44,891,750	4 orang	44,891,750	14 orang	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum (persen)	100 %	100 %	633,576,320	100 %	677,611,620	100 %	633,576,320	100 %	653,576,320	400 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	1 paket	10,023,750	4 paket	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	12 paket	12 paket	371,731,790	12 paket	409,789,390	12 paket	371,731,790	12 paket	371,731,790	48 paket	Sekretaris	SKPD

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)												
		x.xx.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	70,245,000	12 paket	70,245,000	12 paket	70,245,000	12 paket	70,245,000	48 paket	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	24,690,000	12 paket	24,790,000	12 paket	24,690,000	12 paket	24,690,000	48 paket	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	48 dokumen	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	21 laporan	73 laporan	151,005,780	110 laporan	156,883,480	97 laporan	151,005,780	110 laporan	171,005,780	390 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah (persen)	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	40,000,000	0 %	0	100 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	0 unit	0	0	0 unit	0	1 unit	40,000,000	0 unit	0	1 unit	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang (persen)	100 %	100 %	174,306,200	100 %	166,583,000	100 %	174,306,200	100 %	174,306,200	400 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 laporan	12 laporan	32,661,600	12 laporan	19,800,000	12 laporan	32,661,600	12 laporan	32,661,600	48 laporan	Sekretaris	SKPD

		x.xx.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	72,200,000	48 laporan	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	2 laporan	2 laporan	22,370,000	8 laporan	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	47,074,600	48 laporan	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah (persen)	100 %	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	400 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13 unit	13 unit	113,340,000	13 unit	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0 unit	1 unit	250,000,000	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	100,000,000	2 unit	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	200,000,000	0 unit	0	1 unit	Sekretaris	SKPD

ilitasi (unit)																
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga				Persentase pemuda terampil (%)	0,041 % 31 / 75.445* 100%	0,066 % 50 / 75.445* 100%		0,068 % 51 / 75.445* 100%		0,069 % 52 / 75.445* 100%		0,07 % 53 / 75.445* 100%	9.390.000.000	0,07 % 53 / 75.445* 100%	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan			Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi (%)	103,33 % (31/30* 100)	71,43 % (50/70* 100)	500,000,000	72,86 % (51/70* 100)	646,332,800	74,29 % (52/70* 100)	650,000,000	75,71 % (53/70* 100)	650,000,000	75,71 % (53/70* 100)	Kepala Dinas	Kab. Batola
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi (%)	103,33 % (31/30* 100)	71,43 % (50/70* 100)	500,000,000	72,86 % (51/70* 100)	646,332,800	74,29 % (52/70* 100)	650,000,000	75,71 % (53/70* 100)	650,000,000	75,71 % (53/70* 100)	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi (orang)	31 orang	50 orang	400,000,000	51 orang	546,332,800	52 orang	550,000,000	53 orang	550,000,000	206 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	31 orang	50 orang	400,000,000	51 Orang	396,332,800	52 Orang	400,000,000	53 orang	400,000,000	206 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	100 % (1/1 okp X 100%)	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	400 %	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

			Kabupaten/Kota													
		2.19.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	3 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	4 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota pramuka yang menerima penghargaan (orang)	0 orang	14 orang	600,000,000	15 orang	400,000,000	16 orang	600,000,000	17 orang	600,000,000	62 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah keikutsertaan lomba kepramukaan tingkat daerah dan nasional (orang)	32 orang	40 orang	600,000,000	54 orang	400,000,000	56 Orang	600,000,000	58 orang	600,000,000	208 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (organisasi)	4 organisasi	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	400,000,000	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	600,000,000	29 Organisasi	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
				Persentase prestasi olahraga (%)	22,22 % (10 / 45*100 %)	66,67 % (30 / 45*100%)		33,33 % (15 / 45*100 %)		88,89 % (40 / 45*100 %)		57,78 % (26 / 45*100%)		246,67 % (111 / 45*100 %)	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan			Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi (%)	11,11 % (10 / 90 org*100 %)	26,79 % (30 /112 org*100 %)		13,39 % (15 /112 org*100 %)		35,71 % (40 /112 org*100 %)		23,21 % (26 /112 org*100 %)		23,21 % (26 /112 org*100 %)	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi (%)	11,11 % (10 / 90 org*100 %)	26,79 % (30 /112 org*100 %)	4,716,181,500	13,39 % (15 /112 org*100 %)	4,542,261,445	35,71 % (40 /112 org*100 %)	5,316,181,500	23,21 % (26 /112 org*100 %)	5,316,181,500	23,21 % (26 /112 org*100 %)	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi (orang)	10 org	30 org	1,260,000,000	15 org	1,360,890,000	40 org	1,760,000,000	26 org	1,760,000,000	26 org	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha (unit)	2 unit	2 unit	160,000,000	2 unit	151,800,000	2 unit	160,000,000	2 unit	160,000,000	8 unit	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	44.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	8 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2 unit	5 unit	1,000,000,000	5 unit	1,165,000,000	5 unit	1,500,000,000	5 unit	1,500,000,000	20 unit	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

			Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	yang Tersedia dan Termanfaatkan (unit)												
		2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah dan nasional (orang)	98 orang	112 orang	1,506,181,500	112 orang	1,131,371,445	112 orang	1,506,181,500	112 orang	1,506,181,500	448 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	3 dokumen	5 dokumen	1,506,181,500	5 dokumen	1,131,371,445	5 dokumen	1,506,181,500	5 dokumen	1,506,181,500	20 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan latihan tingkat daerah provinsi (orang)	0 orang	0 orang	0	8 orang	100,000,000	8 orang	100,000,000	8 orang	100,000,000	24 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (pelatda)	0 pelatda	0 pelatda	0	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	100,000,000	3 pelatda	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang olahraga yang aktif dibina (%)	100 %	100 % (39/39 cabor * 100%)	1,950,000,000	100 % (39/39 cabor * 100%)	1,950,000,000	100 % (39/39 cabor * 100%)	1,950,000,000	100 % (39/39 cabor * 100%)	1,950,000,000	400%	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1,950,000,000	3 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola						

2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
Meningkatkan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata				PDRB pendapatan Perkapita (rupiah)	5,59 rupiah (1.800.000.000/321.770.000)	5,59 rupiah (1.800.000.000/321.770.000)		5,78 rupiah (1.860.000.000/321.770.000)		5,97 rupiah (1.920.000.000/321.770.000)		6,15 rupiah (1.980.000.000/321.770.000)		6,15 rupiah (1.980.000.000/321.770.000)	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kunjungan wisatawan			Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	178.152 orang	189.375 orang		189.910 orang		192.047 orang		194.720 orang		766.052 orang	Kepala Dinas	Kab. Batola
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase objek pemajuan budaya lokal (%)	45.45 % (5/11*100)	45.45 % (5/11*100)	2,600,000,000	54.55 % (6/11*100)	2,532,149,025	63.64 % (7/11*100)	2,600,000,000	72.73 % (8/11*100)	2,600,000,000	236,37 %	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan daerah yang terkelol (Objek)	5 objek	5 objek	2,600,000,000	6 objek	2,532,149,025	7 objek	2,600,000,000	7 objek	2,600,000,000	25 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	5 objek	5 objek	2,600,000,000	6 objek	2,532,149,025	7 objek	2,600,000,000	7 objek	2,600,000,000	25 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang dikembangkan (buah)	14 buah	14 buah	122,888,700	15 buah	166,178,700	15 buah	172,888,700	15 buah	172,888,700	59 buah	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang terkelola (buah)	14 buah	14 buah	122,888,700	15 buah	122,888,700	15 buah	122,888,700	15 buah	122,888,700	59 buah	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	14 objek	14 objek	122,888,700	15 objek	122,888,700	15 objek	122,888,700	15 objek	122,888,700	59 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola

			Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan (objek)	0 objek	0 objek	0	1 objek	43.290.000	1 objek	50.000.000	1 objek	50.000.000	3 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0 objek	0 objek	0	1 objek	43.290.000	1 objek	50.000.000	1 objek	50.000.000	3 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
Meningkatkan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata				PDRB pendapatan Perkapita (rupiah)	5,59 rupiah (1.800.000.000/321.770.000)	5,59 rupiah (1.800.000.000/321.770.000)		5,78 rupiah (1.860.000.000/321.770.000)		5,97 rupiah (1.920.000.000/321.770.000)		6,15 rupiah (1.980.000.000/321.770.000)		6,15 rupiah (1.980.000.000/321.770.000)	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kunjungan wisatawan			Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	178.152 orang	189.375 orang		189.910 orang		192.047 orang		194.720 orang		194.720 orang	Kepala Dinas	Kab. Batola
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Obyek wisata yang dikunjungi wisatawan (%)	83,33 % (10/12*100%)	83,33 % (10/12*100%)	526,658,400	91,67 % (11/12*100%)	520,163,000	91,67 % (11/12*100%)	526,658,400	100 % (12/12*100%)	526,658,400	366,67 % (12/12*100%)	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Sapta Pesona Pariwisata yang terbangun (%)	16,7 % (2/12*100%)	25 % (3/12*100%)	526,658,400	25 % (3/12*100%)	520,163,000	25 % (3/12*100%)	526,658,400	25 % (3/12*100%)	526,658,400	100 % (3/12*100%)	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara (unit)	2 unit	3 unit	500,000,000	3 unit	497,929,600	3 unit	500,000,000	3 unit	500,000,000	12 unit	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota (Laporan)	5 laporan	5 laporan	26,658,400	5 laporan	22,233,400	5 laporan	26,658,400	5 laporan	26,658,400	20 laporan	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola

		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	178.152 orang	189.375 orang	604,510,780	189.910 orang	604,510,780	192.047 orang	604,510,780	194.720 orang	604,510,780	194.720 orang	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata lama tinggal wisatawan (hari)		0,27 hari (6,48 jam/24 jam)	604,510,780	0,28 hari (6,72 jam/24 jam)	604,510,780	0,29 hari (6,96 jam/24 jam)	604,510,780	0,30 hari (7,2 jam/24 jam)	604,510,780	0,30 hari (7,2 jam/24 jam)	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (laporan)	5 laporan	6 laporan	604,510,780	7 laporan	604,510,780	8 laporan	604,510,780	8 laporan	604,510,780	29 laporan	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola

Tabel 6. 2.b.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Barito Kuala

Sesudah Reviu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca- naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026				
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
x.xx																
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Nilai SAKIP Kabupaten	68.94	68.94		70.94		72.94		74.94		76.94	Kepala Dinas	SKPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disporbudpar			Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar	89.81	89.86		90		91		92		92	Kepala Dinas	SKPD
		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian nilai SAKIP Disporbudpar	89.81 %	89.86 %	3,871,42 3,534	90 %	3,921,2 71,234	91 %	4,084,356, 620	92 %	4,304, 356,6 20	92 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	29,70	27,84	111,640,00 0	27,85	120,475 ,600	27,88	111,640,0 00	27,91	111,6 40,00 0	27,91	Sekretaris	SKPD
				Nilai evaluasi SAKIP dari	20,94	26,35		26,39		26,42		26,48		26,48		

				komponen pengukuran kinerja												
				Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan Kinerja	13,56	13,86		13,87		13,89		13,90		13,90		
				Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	21,81	21,81		21,89		22,81		23,71		23,71		
				Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		x.xx.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12 laporan	12 laporan	111,640,000	12 laporan	120,475,600	12 laporan	111,640,000	12 laporan	111,640,000	12 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan (persen)	100 %	100 %	2,804,669,264	100 %	2,804,669,264	100 %	3,006,602,350	100 %	3,006,602,350	100 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	20 orang/Bulan	20 orang/Bulan	2,798,066,914	22 orang/bulan	2,798,066,914	25 orang/Bulan	3,000,000,000	25 orang/bulan	3,200,000,000	25 orang/bulan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1 laporan	6,602,350	1 laporan	Sekretaris	SKPD						

				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)												
		x.xx.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terampil (persen)	0 %	15 %	33,891,750	15 %	38,591,750	20 %	44,891,750	20 %	44,891,750	20 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0 orang	3 orang	33,891,750	3 orang	38,591,750	3 orang	44,891,750	4 orang	44,891,750	4 orang	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum (persen)	100 %	100 %	633,576,320	100 %	677,611,620	100 %	633,576,320	100 %	653,576,320	100 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	1 paket	10,023,750	1 paket	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	371,731,790	12 paket	409,789,390	12 paket	371,731,790	12 paket	371,731,790	12 paket	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	70,245,000	12 paket	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12 paket	12 paket	24,690,000	12 paket	24,790,000	12 paket	24,690,000	12 paket	24,690,000	12 paket	Sekretaris	SKPD

		x.xx.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	5,880,000	12 dokumen	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	21 laporan	73 laporan	151,005,780	110 laporan	156,883,480	97 laporan	151,005,780	110 laporan	171,005,780	110 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah (persen)	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	40,000,000	0 %	0	0 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	0 unit	0	0	0 unit	0	1 unit	40,000,000	0 unit	0	0 unit	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang (persen)	100 %	100 %	174,306,200	100 %	166,583,000	100 %	174,306,200	100 %	174,306,200	100 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 laporan	12 laporan	32,661,600	12 laporan	19,800,000	12 laporan	32,661,600	12 laporan	32,661,600	12 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	72,200,000	12 laporan	72,200,000	12 laporan	72,200,000	12 laporan	72,200,000	12 laporan	Sekretaris	SKPD

				(laporan)												
		x.xx.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	2 laporan	2 laporan	22,370,000	2 laporan	23,750,000	2 laporan	22,370,000	2 laporan	22,370,000	2 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	47,074,600	12 laporan	50,833,000	12 laporan	47,074,600	12 laporan	47,074,600	12 laporan	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah (persen)	100 %	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	100 %	113,340,000	100 %	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	13 unit	13 unit	113,340,000	13 unit	Sekretaris	SKPD						
		x.xx.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0 unit	1 unit	250,000,000	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	100,000,000	1 unit	Sekretaris	SKPD
		x.xx.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	200,000,000	0 unit	0	0 unit	Sekretaris	SKPD

2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/ Nasional	42 orang	50 orang		53 orang		55 orang		57 orang	9.390.000.000	57 orang	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan			Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi /nasional	42 orang	50 orang	500,000,000	53 orang	646,332,800	56 orang	650,000,000	57 orang	650,000,000	57 orang	Kepala Dinas	Kab. Batola
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/nasional	52 orang	54 orang	500,000,000	60 orang	646,332,800	62 orang	650,000,000	64 orang	650,000,000	64 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang Ditingkatkan Penyadaran, Pemberdayaan danPengembang annnya (orang)	52 orang	54 orang	400,000,000	60 orang	546,332,800	62 orang	550,000,000	64 orang	550,000,000	64 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (orang)	52 orang	54 orang	400,000,000	60 orang	396,332,800	62 Orang	400,000,000	64 orang	400,000,000	68 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

		2.19.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/ Kota (dokumen)	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten yang Ditingkatkan Pemberdayaan, dan Pengembangannya (organisasi)	1 organi Sasi	1 organi Sasi	100,000,000	1 organi Sasi	146,332,800	1 organi Sasi	150,000,000	1 organi Sasi	150,000,000	1 organi Sasi	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola						
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota pramuka yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/ Nasional	0 orang	50 orang	600,000,000	52 orang	400,000,000	54 orang	600,000,000	56 orang	600,000,000	56 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang berpotensi mendapatkan penghargaan ditingkat provinsi/	4 organisasi	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	400,000,000	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

				nasional (organisasi)												
		2.19.04.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (organisasi)	4 organisasi	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	400,000,000	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	600,000,000	4 organisasi	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
				Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/ nasional/ internasional	10 orang	35 orang		45 orang		47 orang		49 orang		49 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan			Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/ Nasional/ Internasional	10 buah	35 buah		45 buah		47 buah		49 buah		49 buah	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mewakili kabupaten di tingkat provinsi/ Nasional	102 orang	112 orang	4,716,181,500	150 orang	4,542,261,445	155 orang	5,316,181,500	160 orang	5,316,181,500	160 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang berpotensi atletnya memperoleh medali di tingkat provinsi/nasional (cabor)	11 cabor	14 cabor	1,260,000,000	16 cabor	1,360,890,000	18 cabor	1,760,000,000	20 cabor	1,760,000,000	20 cabor	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 unit	2 unit	160,000,000	2 unit	151,800,000	2 unit	160,000,000	2 unit	160,000,000	2 unit	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola

			Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	dan Dunia Usaha yang Dikembangkan (unit)												
		2.19.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	44.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (unit)	2 unit	4 unit	1.000,000,000	5 unit	1.165.000,000	6 unit	1.500.000,000	7 unit	1.500.000,000	7 unit	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten	98 orang	350 orang	1.506,181,500	350 orang	1.131.371,445	350 orang	1.506.181,500	350 orang	1.506.181,500	350 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (dokumen)	3 dokumen	4 dokumen	1.506,181,500	5 dokumen	1.131.371,445	6 dokumen	1.506.181,500	7 dokumen	1.506.181,500	7 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah atlet yang mengikuti pemusatan	0 orang	8 orang	100.000,000	8 orang	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola						

			Tingkat Daerah Provinsi	latihan tingkat daerah provinsi												
		2.19.03.2.	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) (pelatda)	0 pelatda	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	100,000,000	1 pelatda	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif dibina	33 cabor	35 cabor	1,950,000,000	36 cabor	1,950,000,000	37 cabor	1,950,000,000	38 cabor	1,950,000,000	38 cabor	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
		2.19.03.2.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (dokumen)	1 dokumen	3 dokumen	1,950,000,000	3 dokumen	1,950,000,000	3 dokumen	1,950,000,000	3 dokumen	1,950,000,000	3 dokumen	Kepala Bidang Pemuda Olahraga	Kab. Batola
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata				Persentase pendapatan sektor pariwisata	6,20 % (1.800.000.000/29.000.000)	8,27 % (2.400.000.000/29.000.000)		8,7 % (2.540.000.000/29.000.000)		8,79 % (2.550.000.000/29.000.000)		8,88 % (2.575.000.000/29.000.000)		8,88 % (2.575.000.000/29.000.000)	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata			Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata	40 %	40 %		50 %		60 %		70 %		70 %	Kepala Dinas	Kab. Batola
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penonton usia lebih dari 10 tahun	7.000 orang	7.500 orang	2,600,000,000	8.500 orang	2,532,149,025	10.000 orang	2,600,000,000	12.500 orang	2,600,000,000	12.500 orang	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola

		2.22.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikelola masyarakat dengan baik	4 objek	4 objek	2,600,000,000	5 objek	2,532,149,025	6 objek	2,600,000,000	7 objek	2,600,000,000	7 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	4 objek	4 objek	2,600,000,000	5 objek	2,532,149,025	6 objek	2,600,000,000	7 objek	2,600,000,000	7 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi cagar budaya	14.500 orang	18.500 orang	122,888,700	19.000 orang	166,178,700	19.500 orang	172,888,700	20.000 orang	172,888,700	20.000 orang	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	14 buah	14 buah	122,888,700	15 buah	122,888,700	16 buah	122,888,700	17 buah	122,888,700	17 buah	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	14 objek	14 objek	122,888,700	15 objek	122,888,700	16 objek	122,888,700	17 objek	122,888,700	17 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02.	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan (objek)	0 objek	0 objek	0	1 objek	43.290.000	1 objek	50.000.000	1 objek	50.000.000	1 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
		2.22.05.2.02.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0 objek	0 objek	0	1 objek	43.290.000	1 objek	50.000.000	1 objek	50.000.000	1 objek	Kepala Bidang Kebudayaan	Kab. Batola
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata				Persentase pendapatan sektor pariwisata	6,20 % (1.800.000.000/29.000.000)	8,27 % (2.400.000.000/29.000.000)		8,7 % (2.540.000.000/29.000.000)		8,79 % (2.550.000.000/29.000.000)		8,88 % (2.575.000.000/29.000.000)		8,88 % (2.575.000.000/29.000.000)	Kepala Dinas	Kab. Batola
	Meningkatnya kualitas			Jumlah Kunjungan	178.152	189.375 orang	526,658,400	194.910 orang	520,163,000	195.047 orang	526,658,400	196.720 orang	526,658,400	196.720 orang	Kepala Dinas	Kab. Batola

	pembangunan wisata daerah			Wisatawan	orang								0			
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata yang memenuhi Sapta Pesona Pariwisata (objek)	-	1 objek	526,658,400	1 objek	520,163,000	1 objek	526,658,400	1 objek	526,658,400	1 objek	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Atraksi di destinasi pariwisata (event)	-	1 event	526,658,400	1 event	520,163,000	1 event	526,658,400	1 event	526,658,400	1 event	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara (unit)	2 unit	3 unit	500,000,000	4 unit	497,929,600	5 unit	500,000,000	6 unit	500,000,000	6 unit	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.02.2.03.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota (Laporan)	4 laporan	4 laporan	26,658,400	5 laporan	22,233,400	6 laporan	26,658,400	7 laporan	26,658,400	7 laporan	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan	0,083 hari (2 jam/ 24 jam)	0,083 hari (2 jam/ 24 jam)	604,510,780	0,104 hari (2,5 jam/24 jam)	604,510,780	0,125 hari (3 jam/24 jam)	604,510,780	0,146 hari (3,5 jam/24 jam)	604,510,780	0,146 hari (3,5 jam/24 jam)	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	5 laporan	6 laporan	604,510,780	7 laporan	604,510,780	8 laporan	604,510,780	9 laporan	604,510,780	9 laporan	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola
		3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik	5 laporan	6 laporan	604,510,780	7 laporan	604,510,780	8 laporan	604,510,780	9 laporan	604,510,780	9 laporan	Kepala Bidang Pariwisata	Kab. Batola

			Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Negeri (laporan)													
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah tiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Indikator Kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

Hubungan Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 seperti digambarkan pada tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.a.
Indikator Kinerja
Disporbudpar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Sebelum Reviu

No.	Tujuan RPD	Indikator	Sasaran RPD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
										2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pemuda terampil	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	103,33 % (31/30*100)	71,43 % (50/70*100)	72,86 % (51/70*100)	74,29 % (52/70*100)	75,71 % (53/70*100)	294 % (206/70*100)
						Persentase prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi	11,11 % (10 / 90 org*100 %)	26,79 % (30 /112 org*100 %)	13,39 % (15 /112 org*100 %)	35,71 % (40 /112 org*100 %)	23,21 % (26 /112 org*100 %)	99,1 % (111 /112 org*100 %)
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang didukung dengan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana	Gini Rasio	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	Meningkatkan pendapatan perkapita dari sektor pariwisata	PDRB pendapatan Perkapita	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	178.152 orang	189.375 orang	189.910 orang	192.047 orang	194.720 orang	766.052 orang
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disporbudpar	89.81	80	81	82	83	83

Tabel 7.1.b.
Indikator Kinerja
Disporbudpar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Sesudah Reviu

No.	Tujuan RPD	Indikator	Sasaran RPD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator	Sasaran OPD	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
										2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas Kesehatan dan pendidikan	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional	31 orang	50 orang	53 orang	55 orang	57 orang	57 orang
						Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/Nasional/Internasional	10 buah	35 buah	45 buah	47 buah	49 buah	49 buah
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang didukung dengan konektivitas antar wilayah dan penyediaan sarana prasarana	Gini Rasio	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB per kapita	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	Persentase pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Jumlah Kunjungan wisatawan	178.152 orang	189.375 orang	194.910 orang	195.047 orang	196.720 orang	196.720 orang

							Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	70 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar	89.81	89.86	90	91	92	92

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026

Tabel 7.2.

Sebelum reuiu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional
2	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disporbudpar

Sesudah reviu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional
2	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/Nasional/Internasional
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan
4	Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai SAKIP Disporbudpar

Tabel 7.3.a.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026

Sebelum Reviu

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja (%)			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Persentase pemuda terampil	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi	$\frac{\Sigma \text{ pemuda yang berprestasi}}{\Sigma \text{ peserta yang mengikuti lomba}} \times 100 \%$	71,43 %	72,86 %	74,29 %	75,71 %
		Persentase prestasi olahraga	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi	$\frac{\Sigma \text{ atlet yang berprestasi}}{\Sigma \text{ seluruh atlet yang mengikuti lomba}} \times 100 \%$	26,79 %	13,39 %	35,71 %	23,21 %
2.	Meningkatkan pendapa tan perkapita dari sektor pariwisata	PDRB pendapatan Perkapita	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	$\Sigma \text{ kunjungan wisatawan pada tahun berjalan}$	189. 375 orang	189. 910 orang	192. 047 orang	194. 720 orang
3.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Disporbud par	Nilai SAKIP SKPD hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya	89.86	80	81	82

Tabel 7.3.b.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Disporbudpar Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026

Sesudah Reviu

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja (%)			
						2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional	Meningkatnya kualitas SDM kepemudaan	Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional	Σ pemuda dan pramuka yang berprestasi dalam 1 tahun berjalan	50 orang	53 orang	55 orang	57 orang
		Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional	Meningkatnya kualitas SDM keolahragaan	Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/Nasional/Internasional	Σ medali yang diperoleh atlet dalam 1 tahun berjalan	35 buah	45 buah	47 buah	49 buah
2.	Meningkatkan pendapatan sektor pariwisata	Persentase pendapatan sektor pariwisata	Meningkatnya kualitas pembangunan wisata daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Σ Kunjungan Wisatawan 1 tahun berjalan	189.375 orang	194.910 orang	195.047 orang	196.720 orang
			Meningkatnya kontribusi seni budaya dan cagar budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung	Σ objek pemajuan kebudayaan yang aktif / Σ objek pemajuan kebudayaan yang terdaftar	40 %	50 %	60 %	70 %

			pendukung pariwisata	industri pariwisata	x 100 %				
3.	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disporbudpar	Nilai Evaluasi SAKIP Disporbudpar	Nilai SAKIP SKPD hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya	89,86	90	91	92

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan :

1.

D

isusunnya rencana strategis dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.

2. Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala adalah :
- Sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dinas sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Seluruh upaya yang dilakukan oleh masing- masing bidang diharapkan menjadi sinergis dan terpadu serta dapat melengkapi satu sama lain baik didalam pola sikap dan tindakan.
 - Menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan daerah.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan pelayanan,

dinamika dan kinerja organisasi tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan atau kondisi sektor pembangunan lainnya.

4. Isu pokok :

- a. Di bidang pemuda dan olahraga yaitu kualitas sumber daya pemuda masih banyak memerlukan latihan keterampilan, kewirausahaan, kecakapan hidup yang dapat memberikan bekal dalam merebut berbagai peluang kesempatan kerja, sarana dan prasarana pendukung pembinaan pemuda masih terbatas, masih rendahnya prestasi olahraga dan terbatasnya pencetakan kader olahragawan yang berkualitas, masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap olahraga, keterbatasan dukungan sarana dan dana dalam pembinaan cabang-cabang olahraga di kecamatan dan desa.
- b. Di bidang pariwisata yaitu masih terbatasnya kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah dari potensi obyek dan daya tarik wisata/destinasi, pembangunan obyek dan daya tarik wisata masih bertumpu kepada keinginan produk bukan kepada orientasi keinginan pasar, lemahnya SDM, aparatur dan tenaga pengelola industri pariwisata sehingga kualitas pelayanan masih rendah.
- c. Di bidang kebudayaan yaitu belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan kesenian/kebudayaan serta semakin berkurangnya tokoh-tokoh kesenian daerah, upaya pengendalian/pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya memerlukan dukungan tenaga profesional dan partisipasi masyarakat, dan belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan untuk melestarikan seni budaya daerah, sehingga anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan dan pelestarian seni daerah belum mencapai hasil maksimal.

5. Strategi dan Kebijakan :

- a. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda.
 - 2) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga.
 - 3) Meningkatkan promosi terhadap potensi kebudayaan terutama kebudayaan unggulan.
 - 4) Memasarkan objek wisata.
 - 5) Peningkatan promosi pemasaran objek wisata.
- b. Kebijakannya yaitu :
- 1) Pembinaan kepemudaan.
 - 2) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.
 - 3) Meningkatkan partisipasi dan peran serta Pemuda dibidang penyadaran, pemberdayaan & pengembangan.
 - 4) Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.
 - 5) Pengembangan rasa kecintaan akan budaya lokal
 - 6) Pengembangan kebudayaan daerah.
 - 7) Pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah dan purbakala kawasan cagar budaya, sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

B. Saran

- 1) Diharapkan hubungan Kabupaten Barito Kuala dengan pusat/provinsi dan hubungan antar kabupaten/kota merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien.
- 2) Sinergitas hubungan antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta kelompok-kelompok pemuda, olahraga, pelaku usaha pariwisata serta pelaku seni dan budaya terus lebih dioptimalkan guna mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Telpon/Fax (0511) 4799486
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 188.4/ 120 /Disporbudpar/2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA
DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis, diperlukan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 ;
12. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012

14. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala NomorTahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- KETIGA : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, bertugas dan bertanggungjawab dalam penyusunan Renstra 2023-2026 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Barito Kuala
Pada tanggal 10 Februari 2022
Plt.Kepala,



Siti Raudatul Jannah, AMK
NIP. 19690404 199203 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Telpon/Fax (0511) 4799486
M A R A B A H A N 70513

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 - 2026

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung jawab	SITI RAUDATUL JANNAH, AMK	Plt. Kepala Dinas
2	Ketua	SABIRIN,S.Sos,MM	Kabid kebudayaan
3	Sekretaris	YULINDA,SSTP	Kasubbag Umum & Kepegawaian
4	Anggota	Hj.TITIEN HARIYATI,S.STP,MM	Kabid Pemuda Olahraga
		MUHAMMAD DIDIK KAHARUDIN, S.IP, MA	Kabid Pariwisata
5	TimTeknis	JAHRANI, A.Md	Kasubbag Program, Keuangan & Aset
		GUTRAH, S.Pd	Jafung Bid.Kebudayaan
		WIDYA ASTUTY,S.Sos	Jafung Bid.Kepemudaan Olahraga
		AKHMAD RIZALI HADI, S.Sos	Jafung Bid.Kepemudaan Olahraga
		DEWY ARIYANTI, S.Pd	Jafung Bid.Pariwisata
		DEWI KASIAH, S.Pd	Jafung Bid.Pariwisata
6	Sekretariat	MUTHI ABDI, SE	Staf Subbag PKA

Marabahan, 10 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS,



SITI RAUDATUL JANNAH, AMK

NIP 19690404 199203 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Telpon/Fax (0511) 4799486
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 050 / /Disporbudpar/2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No 821.23/03-Si.1-BKPP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administratur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No 821.24/05-Si.1-BKPP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023 nomor 700/90.f/LHE-SAKIP/IRBAN III/INSPT tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Disporbudpar Tahun 2023
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817) ;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 ;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/MPPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014 ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-

- 2022 ;
32. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2023 - 2026 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
 33. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;
 34. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penyesuaian Perubahan Pejabat Administratur dan Pejabat Pengawas pada Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala ;
- KEDUA** : Penyesuaian Perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Dinas Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala ;
- KETIGA** : Penyesuaian tujuan RENSTRA dengan indikator sasaran RPJMD ;
- KEEMPAT** : Seluruh materi Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 tertuang dalam Suplemen Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS,

SABIRIN, S.Sos, MM
NIP. 19681211 200501 1008



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Telpon/Fax (0511) 4799486
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 050 / /Disporbudpar/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023-2026

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung jawab	Sabirin,S.Sos,MM	Kepala Dinas
2	Ketua	Ratna Sari Dewi , SP, M.Kes	Sekretaris
3	Tim Pelaksana	Arie Deny Wahyudi, S.STP, M.AP	Kabid Pemuda Olahraga
		Hj.Sri Minarni, S.AP	Kabid Pariwisata
		Aulia Rosyadi,S.STP	Kabid kebudayaan
		Mariyatul Jannah, S.Ag	Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset

Ditetapkan di Barito Kuala
Pada tanggal 1 Maret 2024

Kepala,



SABIRIN,S.Sos, MM

NIP. 19681211 200501 1008

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
 BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR 050 / /Disporbudpar/2024
 TANGGAL 1 Maret 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS DINAS
 KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BARITO KUALA 2023-2026

**PERUBAHAN PERTAMA RENSTRA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 2023-2026**

**BUTIR-BUTIR PERUBAHAN RENSTRA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
 TAHUN 2023-2026**

BAB I	:	- Tidak ada perbaikan
BAB II	:	- Tidak ada perbaikan
BAB III	:	- Tidak ada perbaikan
BAB IV	:	- Halaman 36 perubahan pada Tujuan , di Tabel Indikator Tujuan disajikan : sebelum reviu (Persentase pemuda terampil) dan sesudah reviu menjadi (Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional) sebelum reviu (Persentase prestasi olahraga) dan sesudah reviu menjadi (Jumlah atlet yang berprestasi tingkat Provinsi/Nasional/Nasional) sebelum reviu (PDRB pendapatan Perkapita) dan sesudah reviu menjadi (PDRB pendapatan sektor pariwisata) sebelum reviu (Nilai SAKIP) dan sesudah reviu menjadi (Nilai SAKIP Kabupaten) Halaman 37 disajikan pada Tabel Indikator Sasaran sebelum reviu (Persentase pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional) menjadi (Jumlah pemuda yang menerima penghargaan di tingkat provinsi/nasional/internasional) sebelum reviu (Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional) menjadi (Perolehan medali pada kejuaraan olahraga tingkat provinsi/nasional/internasional) sebelum reviu (Jumlah kunjungan wisatawan) menjadi (Pendapatan sektor industri pariwisata) Tambahan sasaran (Meningkatnya kontribusi seni

		<p>budaya dan cagar budaya pendukung pariwisata) dengan indikator (Persentase objek pemajuan kebudayaan pendukung industri pariwisata)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halaman 38 disajikan pada Tabel 4.1.a Tujuan dan Sasaran yang belum direviu - Halaman 39 disajikan pada Tabel 4.1.b. Tujuan dan Sasaran yang sudah direviu - Halaman 41 disajikan pada Tabel 4.2.a. Capaian Kinerja Program sebelum direviu - Halaman 43 disajikan pada Tabel 4.2.b. Capaian Kinerja Program sesudah direviu - Halaman 45 disajikan pada Tabel 4.2.a. Capaian Kinerja Kegiatan sebelum direviu - Halaman 56 disajikan pada Tabel 4.2.b. Capaian Kinerja Kegiatan sesudah direviu
BAB V	:	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman 83 disajikan pada Tabel 5.2. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebelum direviu - Halaman 83 disajikan pada Tabel Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesudah direviu
BAB VI	:	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman 90 disajikan pada Tabel 6.2.a. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum reviu - Halaman 101 disajikan pada Tabel 6.2.b. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesudah reviu
BAB VII	:	<ul style="list-style-type: none"> - Halaman 114 disajikan pada Tabel 7.1.a. Indikator Tujuan sebelum reviu - Halaman 115 disajikan pada Tabel 7.1.a. Indikator Tujuan sesudah reviu - Halaman 116 disajikan pada Tabel 7.2.a. Indikator Sasaran sebelum reviu - Halaman 116 disajikan pada Tabel 7.2.b. Indikator Sasaran sesudah reviu - Halaman 117 disajikan pada Tabel 7.3.a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah sebelum reviu - Halaman 118 disajikan pada Tabel 7.3.b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah sesudah reviu
BAB VIII	;	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perbaikan

Marabahan, 15 Maret 2024

Kepala Dinas,



SABIRIN, S.Sos, MM

NIP. 19681211 200501 1008